

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Korea Utara merupakan salah satu negara yang melakukan pengembangan program nuklir dan memiliki beberapa jenis senjata rudal yang ditenagai oleh energi nuklir. Keputusan Korea Utara dalam melakukan pengembangan program nuklir dan juga mendeklarasikan kepemilikan senjata nuklirnya secara global ini menjadikan Korea Utara sebagai negara antagonis dan kontroversial dalam sistem internasional. Sehingga, Korea Utara menerima konsekuensi dari tindakannya tersebut dari berbagai aktor internasional khususnya Amerika Serikat dan juga PBB. Pengembangan program nuklir oleh Korea Utara ini merupakan bentuk upaya Korea Utara dalam menjaga kedaulatan negaranya, selain itu program nuklir ini juga dijadikan oleh Korea Utara sebagai alat atau instrumen diplomasinya dalam mencapai dan mempertahankan *regime survive, economic, dan security* negaranya.

Amerika Serikat bersama negara aliansinya, Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang paling gencar dalam melakukan upaya terhadap Korea Utara dalam merealisasikan denuklirisasi. Bagi Amerika Serikat, Korea Utara telah melanggar perjanjian-perjanjian internasional terkait pengembangan senjata nuklir, dan hal ini secara jelas menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dunia, khususnya Kawasan Asia Timur dan wilayah Semenanjung Korea. Selain memicu instabilitas keamanan, tindakan Korea Utara ini juga secara jelas telah mengganggu kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea.

Kepentingan Amerika Serikat ini meliputi kepentingan ekonomi dan juga kepentingan dalam mempertahankan hegemoninya di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga berupaya dalam melindungi negara aliansinya, Korea Selatan dan Jepang dari ancaman senjata nuklir Korea Utara, karena Korea Selatan dan Jepang ini merupakan garda terdepan Amerika Serikat dalam menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia, dimana situasinya sekarang Amerika Serikat berada dalam kondisi perebutan kekuasaan dan pengaruh dengan Tiongkok. Hal inilah yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam melakukan strategi *deterrence* untuk merealisasikan denuklirisasi Korea Utara.

Secara sederhana, *Deterrence* sendiri merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh suatu aktor atau negara dalam mencegah negara lain untuk melakukan atau memperluas ancaman yang diberikannya. *Deterrence* meliputi beberapa aktivitas yang mewakili strategi ini, yaitu: membujuk suatu negara untuk tidak melakukan ancaman dengan memberikan gambaran konsekuensi yang akan diterima oleh negara tersebut, melakukan tindakan dalam artian memberlakukan sanksi, dan yang terakhir adalah melakukan perubahan kebijakan melalui perubahan pemerintah. Dalam konteks ini, Amerika Serikat mengambil strategi *deterrence* untuk mendesak Korea Utara agar bersedia melakukan pelucutan terhadap fasilitas nuklirnya.

Adapun bentuk tindakan *deterrence* yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara dapat dilihat dari fenomena-fenomena interaksi dari kedua negara ini yaitu: 1) pemberlakuan sanksi ekonomi oleh DK PBB melalui Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang bertujuan untuk menekan perekonomian untuk

menghambat Korea Utara dalam melakukan pengembangan program nuklirnya dan akhirnya bersedia untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya; 2) penguatan sektor pertahanan Amerika Serikat, melalui tindakan ini Amerika Serikat juga menjalin kerjasama dengan negara aliansinya Korea Selatan dan Jepang dalam membentuk aliansi pertahanan trilateral. Selain itu, Amerika juga melakukan penguatan sektor pertahanan dengan memasang THAAD yang merupakan sistem pertahanan anti-rudal dengan Korea Selatan untuk mengantisipasi serangan langsung oleh Korea Utara baik ke wilayah kedaulatan Amerika Serikat maupun ke negara-negara aliansinya; 3) perundingan Amerika Serikat dengan Korea Utara melalui KTT. Hal ini bertujuan untuk membujuk Korea Utara agar bersedia bekerjasama dalam merealisasikan denuklirisasi.

Meskipun Amerika Serikat telah melakukan berbagai tindakan *deterrence* terhadap Korea Utara dalam mencapai denuklirisasi, sampai saat ini masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Hubungan antara Korea Utara dan Amerika juga sempat membaik dan diprediksi akan memasuki tahapan baru yang lebih baik setelah adanya kesepakatan kedua kepala negara ini untuk melakukan perundingan melalui KTT. Hanya saja, perundingan yang dilakukan tersebut juga belum mampu mencapai *bargaining zone* yang disepakati kedua negara ini dan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, setelah KTT Hanoi, Vietnam pada awal tahun 2019 ini Amerika Serikat dan Korea Utara kembali menjalani hubungan yang panas. Hingga saat ini hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara masih bersifat fluktuatif.

5.2 Saran

Korea Utara hingga saat ini masih melakukan pengembangan terhadap program nuklir miliknya meskipun mendapat berbagai penentangan dari negara-negara dunia. Hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikatpun kini juga kembali memanas setelah aksi saling kecam oleh masing-masing pemimpin negara tersebut, dan strategi *deterrence* Amerika Serikat yang meliputi beberapa tindakan ini juga belum membuahkan hasil secara signifikan. Melalui penelitian ini, penulis juga menyarankan agar Amerika Serikat selaku negara *super power* dan satu-satunya negara hegemoni di dunia tetap melakukan upaya dan menemukan strategi baru yang lebih efektif dalam proses merealisasikan denuklirisasi Korea Utara demi menjaga stabilitas keamanan di dunia khususnya Kawasan Asia Timur dan wilayah Semenanjung Korea.

Berangkat dari saran tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam penelitian ini seperti, bagaimana strategi lanjutan dari Amerika Serikat terkait pengembangan program nuklir Korea Utara dan apa upaya Amerika Serikat selanjutnya dalam mencapai kepentingannya di Kawasan Asia Pasifik serta seperti apa upaya Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas keamanan dunia sebagai satu-satunya negara hegemoni dunia. Ini berguna untuk melihat sejauh mana kredibilitas Amerika sebagai negara *super power* dan pusat hegemoni dunia.